

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai permasalahan sosial selalu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas sehingga regulasi yang telah terbentuk hanya sebagai formalitas bagi aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Berbagai ketimpangan sosial yang dialami oleh penyandang tuna daksa dalam mendapatkan hak mereka untuk bekerja belum diindahkan keberadaannya. Kesadaran dari berbagai elemen justru melemahkan posisi penyandang tuna daksa sehingga tindak diskriminasi terjadi pada kehidupan tuna daksa di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dapat disimpulkan antara lain, yaitu

Pertama, pandangan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyandang tuna daksa. Pandangan tersebut terbagi atas dua antara lain pandangan positif dan pandangan negatif. Sekitar 44% menunjukkan dukungan atau pandangan positif kepada penyandang tuna daksa. Pandangan positif berupa dukungan moril dimana pandangan positif yang pro terhadap kondisi penyandang tuna daksa bukan hal yang menjadi penghalang dalam beraktivitas. Selama penyandang tuna daksa memiliki kapabilitas, kompetensi, dan berkompeten, hal tersebut akan menjadi

pertimbangan serta nilai tambah bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Selanjutnya, sekitar 56% masyarakat dan *stakeholders* memiliki pandangan negatif terhadap tuna daksa. Pandangan negatif membuat berbagai spekulasi bahwa seseorang yang mengalami kecacatan fisik adalah orang-orang yang tidak normal dan terus melekat dalam kehidupan sosial. Selain itu, penyandang disabilitas merupakan sebagian orang yang lemah, tidak produktif, dan termasuk orang sakit.

Kedua, adanya berbagai bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh penyandang tuna daksa antara lain, yaitu pelabelan fisik, krisis kepercayaan masyarakat dan *stakeholders*, dan makna dari persyaratan perekrutan pegawai yang diterapkan instansi pemerintah maupun instansi swasta serta. Pelabelan fisik juga dikenakan bagi penyandang tuna daksa seperti si buntung, si pincang, dan lainnya terkait dengan kondisi fisik tuna daksa sehingga menimbulkan rasa malu dalam diri mereka. Krisis kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* ditandai oleh rasa pesimis akan kemampuan tuna daksa bekerja karena keterbatasan fisik yang dimiliki. Persyaratan perekrutan pegawai seperti sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik, serta melampirkan surat keterangan kesehatan terlihat mudah untuk dipenuhi bagi masyarakat normal. Bagi penyandang tuna daksa, persyaratan tersebut sarat akan makna kekerasan simbolik terkait dengan kondisi fisik.

Adapun dampak lanjutan atau imbas dari pandangan masyarakat serta bentuk kekerasan simbolik terhadap peluang kerja tuna daksa membuat disfungsi peran tuna daksa. Kecilnya peluang kerja di ranah instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta, hingga penguatan kemiskinan struktural yang terjadi. Disfungsi peran terkait dengan tidak luasnya tuna daksa dalam berkompetensi dengan modal bakat dan keterampilan yang dimiliki sehingga membuat mereka apatis dan pesimis. kecilnya peluang kerja di ranah instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta meliputi persyaratan perekrutan pegawai pada instansi belum pro penyandang tuna daksa serta belum adanya sanksi tegas pemerintah yang diberikan kepada instansi yang belum mempekerjakan penyandang tuna daksa. Penguatan kemiskinan struktural kesukasan mengakses sumber daya dan aset seperti ilmu pengetahuan, dan informasi selain kemiskinan dari kebutuhan pokok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya tuna daksa belum menjadi persoalan sosial yang diprioritaskan penyelesaiannya. Pembinaan dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya tuna daksa harusnya menjadi tanggung jawab bersama sehingga mereka mendapatkan hak yang sama dalam pemenuhan pekerjaan.

B. Implikasi Teori

Penelitian ini menggunakan teori kekerasan simbolik dari Pierre Felix Bourdieu yang memberikan penjelasan tentang habitus, ranah, modal, dominasi simbolik, dan bahasa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan simbolik pada penyandang tuna daksa untuk memperoleh pekerjaan pada instansi baik itu pemerintah maupun swasta di Kota Sungailiat. Teori yang dikemukakan oleh Bourdieu dianggap relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian terkait perekrutan pegawai untuk penyandang disabilitas khususnya tuna daksa sebagai subjek penelitian di Kota Sungailiat.

Hubungan teori kekerasan simbolik dengan penelitian ini terlihat pada konsep mulai dari habitus hingga bahasa digunakan peneliti untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pandangan masyarakat dan *stakeholders*, dan bentuk kekerasan yang terjadi terhadap peluang kerja tuna daksa dalam perekrutan pegawai di instansi pemerintah maupun swasta terlihat melalui analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, tidak adanya perlawanan apapun dari pihak subordinan yang dalam penelitian ini mengacu pada tuna daksa. Berawal dari habitus yang mengkonstruksi pemikiran masyarakat yang dilakukan oleh aktor-aktor berkepentingan dan memiliki kekuasaan mempengaruhi serta mengontrol, memberikan pengaruh pada laju kekuasaan menggunakan ranah, bahasa, serta modal yang menjadi senjata untuk

melanggengkan posisi kekuasaan. Kekerasan simbolik yang dikemukakan oleh Bourdieu terlihat karena tidak adanya perlawanan dari penyandang tuna daksa terhadap kekuasaan aktor yang bermain dalam realita yang terjadi.

Dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas menyebabkan berbagai ketimpangan, diskriminasi, serta disfungsi peran bagi tuna daksa yang mengalami marginalisasi. Keterbatasan fisik menjadi tolak ukur masyarakat dan *stakeholders* menilai kelayakan serta kemampuan penyandang tuna daksa apakah bisa mereka mengikuti aturan yang dibuat pemangku kebijakan yang sebenarnya tidak mengindahkan posisi tuna daksa sebagai salah satu kelompok yang harusnya dirangkul dan diberdayakan.

Kekerasan simbolik yang terlihat merupakan tindak kepatuhan yang dalam hal ini merugikan penyandang tuna daksa terkait stigma masyarakat dan berbagai aturan yang dibuat sebagai sebuah keharusan untuk diterima apa adanya bahwa yang dikatakan adalah benar kenyataannya tanpa harus ada pembuktian apapun. Jelas mereka yang tuna daksa akan mendapatkan seleksi ketat ataupun tidak akan diterima karena fisik yang tidak mendukung menyebabkan pelanggaran pemikiran bahwa mereka tidak berpotensi untuk bekerja.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan sosial tuna daksa antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penegasan tentang regulasi serta praktik penerapan yang sesuai guna membuka peluang atau kesempatan sebesar-besarnya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas khususnya tuna daksa. Perlunya tindak keseriusan dari dinas terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka seperti sosialisasi kepada instansi baik pemerintah dan swasta, pendataan instansi mana yang telah mempekerjakan kaum disabilitas, serta sanksi tegas yang dikenakan apabila regulasi yang telah ada tidak dijalankan semestinya.
2. Sugesti positif haruslah bisa didukung oleh diri tuna daksa, keluarga, masyarakat, serta *stakeholders* agar bisa membuat pemikiran negatif dalam bentuk pelabelan tidak lagi tertanam kuat dalam pikiran masing-masing. Dukungan dari berbagai pihak menentukan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan pemerintah terkait guna mencapai kehidupan tuna daksa lebih baik dalam bidang pekerjaan formal bagi penyandang disabilitas.

3. Perlu dilakukan revisi persyaratan perekrutan pegawai baik itu pada instansi pemerintah maupun instansi swasta yang tidak memberatkan penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor formal.

